

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung konsekuensi, bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan nilai-nilai sila Ketuhanan, sila Kemanusiaan, sila Persatuan, sila Kerakyatan, dan sila keadilan harus diaktualisasikan secara kongkrit. Ini berarti, bahwa semua produk penyelenggara negara dan pemerintah, baik yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif dari pusat sampai daerah dalam membuat dan menghasilkan peraturan perundangan maupun kebijakan lainnya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu pada tataran implementasi dalam kehidupan bermasyarakat seluruh warga negara Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti juga, bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mengaktualisasikan nilai-nilai sila Ketuhanan, sila Kemanusiaan, sila Persatuan, sila kerakyatan, dan sila Keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejak proklamasi kemerdekaan, masa orde lama, orde baru dan sampai saat ini yang disebut dengan orde reformasi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila terus terjadi dan seakan-akan tidak ada hentinya. Hal ini terjadi baik

pada tataran penyelenggaraan negara dan pemerintahan maupun dalam tataran kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sorotan terhadap perilaku menyimpang para elit politik, jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu terus bermunculan. Begitu pula sorotan tentang perilaku menyimpang masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang seakan-akan tidak pernah ada hentinya.

Secara realita saat ini banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai sila I yakni sila Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat, bahwa masih banyak orang yang mengaku dan menyatakan percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan, namun kenyataannya tidak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya mengaku beragama Islam, Kristen, Katolik atau agama yang lain, tetapi hanya dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tuntutan sikap saling hormat menghormati, sikap bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ibadah yang seharusnya dapat menciptakan terbinanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat sering terciderai dengan adanya sikap, tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Justru kadang muncul sikap memaksakan kehendak dari satu penganut agama dan kepercayaan kepada penganut agama dan kepercayaan yang lain.

Di kalangan peserta didik masih ada penyimpangan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana masih banyak peserta didik yang tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat sekarang banyak peserta didik yang memakai pakaian yang kurang menutup auratnya, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, melakukan hubungan seks bebas, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri,

Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan dalam wujud tindakan dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat terhadap nilai-nilai sila ke II yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi salah satu penyebab hubungan secara horisontal antar warga yang satu dengan warga yang lain kurang harmonis. Sikap pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, sikap harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan senang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang

seharusnya itu menjadi ciri masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan dalam kehidupan bermasyarakat belum bisa terwujud secara baik dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya belum semuanya terwujud secara nyata. Secara khusus di kalangan peserta didik juga banyak penyimpangan terhadap sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik, diantaranya adanya perkelahian antar pelajar yang disertai dengan penyalak, playboy di kalangan pelajar dimana mempermainkan wanita dengan sesuka hati, dan pemerkosaan oleh pelajar.

Nilai sila Persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa masih bermunculan sikap tidak berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menunjukkan sikap kebarat-baratan dan tidak cinta tanah air, membanggakan bangsa lain dari pada bangsanya sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dan golongan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di kalangan peserta didik juga banyak kita jumpai penyimpangan terhadap sila persatuan Indonesia. Penyimpangan itu diantaranya, adalah adanya penurunan sikap nasionalisme. Misalnya bergaya hidup yang kebarat-baratan, mengutamakan produk luar negeri, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya tidak serius, menghormat bendera sang merah putih tidak dengan sikap tegap. Bentrok antar genk pelajar, karena terprovokasi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dewasa ini justru nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara belum terlaksana dan justru terjadi banyak penyimpangan.

Nilai-nilai sila ke IV yang seharusnya diaktualisasikan dengan baik tetapi justru belum dilaksanakan dengan baik. Banyak penyimpangan yang terjadi diantaranya, adalah sikap mengutamakan voting dalam mengambil keputusan dan justru mengabaikan prinsip musyawarah untuk mufakat, dalam pengambilan keputusan tidak didasari sikap kekeluargaan tetapi justru egoisme pribadi dan golongan yang mengemuka, tidak ada etika baik dan kurang bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dalam melaksanakan musyawarah didasari pikiran emosional, tidak berdasarkan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil kurang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, tidak menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan.

Secara khusus ada beberapa penyimpangan peserta didik terhadap sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penyimpangan itu antara lain adanya para pelajar yang tidak menjalankan dan menghargai putusan bersama, kurang menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan egoisme pribadi atau kelompok.

Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Persoalan yang muncul adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya bisa dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum teraktualisasi dengan baik. Kenyataannya justru muncul sikap tidak adil, sikap ketidakmampuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sering adanya pemerasan terhadap orang

lain, banyak orang bersikap boros dan bergaya hidup mewah, serta sikap bermalas-malasan.

Penyimpangan terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dilakukan oleh para peserta didik. Penyimpangan itu diantaranya, adalah masih banyak peserta didik yang hanya menuntut hak dan mengabaikan kewajiban, senang berpoya-poya dan bergaya hidup boros, malas belajar dan tidak suka bekerja keras.

Indikasi secara umum dapat dilihat dengan munculnya kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tindak kekerasan, dan munculnya perilaku tidak terpuji (Mawardi, 2009). Di sisi lain Supriyoko (2003 : 3) menyatakan bahwa tidak sedikit generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji, sikap sopan santun, sifat ramah, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial, yang merupakan jati diri bangsa seakan akan sudah hilang dan tidak lagi melekat secara kuat dalam diri peserta didik. Hal ini diperkuat oleh Samani dan Haryanto (2012 : 2) dan Muhajir (2011 : 34) yang menyatakan bahwa kenakalan remaja yang biasa terjadi, seperti pemerasan antar teman, kekerasan antar teman, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar, adalah demoralisasi di kalangan pelajar. Hal ini diakui atau tidak ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perilaku pelajar sekarang kian bebas dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan tepat. Jika ini tidak ditangani secara serius dan tepat maka fenomena perilaku menyimpang di kalangan pelajar akan semakin meluas dan memprehatinkan.

Hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila belum dijalankan sesuai harapan. Menyikapi hal tersebut dipandang perlu untuk selalu mengupayakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Borba (2001 : 1) yang menyatakan, bahwa tanamkan buah pikiran, anda akan menuai tindakan, tanamkan tindakan, anda akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan, anda akan menuai moral, tanamkan moral anda akan menuai keuntungan.

Kritikan dan sorotan tentang pendidikan di Indonesia tidak hanya masalah moral peserta didik yang masih jauh dari harapan. Kritik dan sorotan itu muncul juga dalam proses pembelajaran, dimana pembelajaran di Indonesia cenderung menekankan aspek pengetahuan dan mengabaikan aspek sikap (Suyanto, 2003). Hal ini berarti guru dalam penyampaian materi belum mengarah kepada penyampaian materi secara komprehensif. Hal ini terjadi juga dalam pembelajaran PPKn. Padahal mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang seharusnya dalam proses pembelajarannya menekankan aspek sikap atau moral.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan banyak faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor guru. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Dalam Kurikulum 2013 menuntut partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik tidak lagi berpusat pada guru. Oleh karena itu suasana kelas perlu dirancang dan dibangun dengan berbagai model pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan teman yang lain secara baik sehingga pada akhirnya peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh.

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Hal ini karena guru dalam proses pembelajaran tidak cukup berbekal pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan melainkan perlu memperhatikan aspek-aspek yang lain yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi peserta didik. Peran guru dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh pihak yang lain (Supriyadi, 1998). Oleh karena itu guru dalam mengajar seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga harus memberikan nilai-nilai, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan pesan secara utuh baik secara pengetahuan, sikap dan keterampilan. Akhirnya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang berkepribadian (Sardiman, 2002).

Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan dan pencapaian potensi peserta didik secara komprehensif dibutuhkan guru yang mempunyai wawasan dan kerangka berpikir yang menyeluruh tentang pembelajaran. Keberhasilan dalam proses pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam menguasai model-model pembelajaran yang inovatif yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pengembangan model pembelajaran yang diharapkan adalah model yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga peserta didik memperoleh kualitas hasil yang baik.

Di samping tuntutan penguasaan model pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru faktor motivasi peserta didik sangat menentukan dalam keberhasilan pembelajaran. Motivasi sangat menentukan proses keberhasilan suatu proses pembelajaran. Apalagi proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai. Proses pendidikan nilai-nilai Pancasila yang sering disebut dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila akan lebih berhasil manakala peserta didik mempunyai motivasi.

Kenyataan menunjukkan, bahwa motivasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengikuti pelajaran PPKn masih rendah. Mata pelajaran PPKn dianggap oleh peserta didik merupakan mata pelajaran yang kurang penting. Hal ini disebabkan mata pelajaran PPKn tidak memberikan bekal keterampilan secara langsung dalam menghadapi dunia kerja. Disamping itu guru PPKn Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam proses pembelajaran kurang memberikan motivasi sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Materi yang disampaikan kurang sesuai dengan lingkungan dan kehidupan nyata peserta didik. Materi yang diberikan kurang membangun rasa kepercayaan diri, kurang memberikan manfaat dan kepuasan bagi peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus dapat membangkitkan motivasi ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*) peserta didik. Pembelajaran yang berlangsung harus memperhatikan : 1). Materi yang diberikan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; 2). Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kondisi peserta didik; 3).

Guru harus memberi pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik, sehingga muncul kepercayaan diri pada peserta didik; 4). Materi yang diberikan harus memberi manfaat dan memberi kepuasan kepada peserta didik. Jika keempat hal tersebut diperhatikan maka akan ada sinergi antara apa yang dilakukan oleh guru dengan apa yang menjadi harapan peserta didik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh guru akan mudah tercapai.

Berdasarkan observasi di sekolah-sekolah dan hasil wawancara awal dengan guru dan MGMP PPKn Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya diperoleh data sebagai berikut : 1). Para guru mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi pendidikan S1 PPKn. Bahkan ada juga yang memiliki jenjang pendidikan S2. Kualifikasi S2 para guru PPKn SMK bukan berasal dari S2 PPKn tetapi S2 non PPKn, Misalnya S2 pendidikan sejarah dan S2 manajemen pendidikan; 2). Para guru dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya kurang, sehingga proses pembelajarannya kurang berkualitas; 3). Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran masih rendah. Hal ini terbukti masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, Sehingga perangkat pembelajaran yang berupa RPP kadang dibuat kadang tidak. Bahkan kalau ada tidak disiapkan dengan baik dan benar. Para guru berpendapat yang penting RPP ada, sekedar untuk memenuhi kewajiban, bahwa guru harus menyusun RPP; 4). Para guru PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya belum memahami secara teori dan implementasi model-model pembelajaran yang inovatif. Bagi guru yang sudah mengetahui model-model pembelajaran belum diimplementasikan dalam proses pembelajaran dengan baik. Guru dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah bervariasi; 5). Para guru dalam proses pembelajaran kurang mempersiapkan materi dengan baik, karena para guru beranggapan, bahwa mengajar merupakan tugas sehari-hari yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, sehingga materinya sudah hafal. Padahal sebagai seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan materi yang disesuaikan dengan perkembangannya. Para guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan lembar Kerja Siswa (LKS); 6). Para guru

dalam mengajar pada umumnya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tidak melakukan evaluasi sesuai tuntutan kurikulum 2013. Para guru dalam melakukan evaluasi hanya menekankan pada aspek pengetahuan; 7). Para guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kurang memperhatikan aspek motivasi peserta didik. Para guru dalam pembelajarannya kurang memperhatikan apakah materinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Kurang memperhatikan apakah materi yang dirancang dan diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik atau tidak. Di samping itu guru kurang memberikan pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan peserta didik, sehingga peserta didik kurang memiliki kepercayaan diri dan jarang melakukan evaluasi apakah materi yang telah diberikan itu memberikan manfaat dan kepuasan kepada peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung; 8). Para guru dalam pembelajaran PPKn yang seharusnya internalisasi nilai-nilai Pancasila ditanamkan kepada peserta didik yang menjadi ciri dalam pembelajarannya yang mengarah untuk membentuk sikap kurang terimplementasikan dengan baik. Justru penyampaian pengetahuan yang lebih dominan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan peserta didik yang diberi pelajaran PPKn diperoleh data, bahwa : 1). Para peserta didik merasa kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan guru dalam mengajar hanya ceramah. Indikatornya adalah pada saat guru mengajar peserta didik banyak yang ramai dan kurang konsentrasi, bahkan ada yang mengantuk; 2). Materi pelajaran PPKn sulit dipahami, materinya berupa pengetahuan yang menuntut peserta didik banyak menghafal bukan menuntut penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan kurang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, tidak dikaitkan dengan kondisi dan lingkungan peserta didik, bahkan materi yang diterima peserta didik kurang bermanfaat; 3). Peserta didik motivasinya rendah dalam mengikuti pelajaran PPKn, karena materinya dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurang relevan dengan keadaan peserta didik, guru kurang memberi penghargaan dan pengakuan kepada peserta didik sehingga kepercayaan dirinya kurang, pembelajarannya dirasakan tidak memberi manfaat dan kepuasan kepada peserta

didik; 4). Peserta didik beranggapan bahwa pelajaran PPKn bukan pelajaran yang dapat memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja setelah lulus. Peserta didik beranggapan bahwa PPKn merupakan mata pelajaran pelengkap saja; 5). Tingkat Internalisasi nilai-nilai Pancasila peserta didik masih rendah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ternyata pada umumnya guru dalam melaksanakan pembelajaran masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Jarang guru yang sudah mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif. Guru dalam melakukan perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran PPKn masih terbatas pada aspek pengetahuan, sedangkan aspek sikap dan keterampilan belum tersentuh secara menyeluruh. Padahal tuntutan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya harus menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan aktivitas peserta didik dengan menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dan melakukan penilaian secara otentik. Di samping itu guru kurang memperhatikan motivasi peserta didik secara utuh sehingga peserta didik kurang tertarik terhadap proses pembelajaran PPKn yang berlangsung. Hal ini berdampak terhadap rendahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn.

Jika temuan tersebut di atas baik yang berkaitan dengan kondisi guru, kondisi peserta didik maupun pelaksanaan pembelajaran dibiarkan dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil pembelajaran.

Selain wawancara dan observasi dalam penelitian pendahuluan juga disebarkan angket. Sampel penelitian sebanyak 150 siswa yang diambil dari 5 sekolah yang berbeda. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive random sampling*. Perbandingan jumlah sampel di setiap kota/kabupatennya dibuat sama yaitu satu kabupaten diambil 1 sekolah, setiap sekolah diambil 30 siswa secara acak. Instrumen penelitian berupa angket tertutup yang terdiri dari 25 pertanyaan. Setiap pertanyaan dalam angket memiliki 4 pilihan jawaban yang bertingkat. Angket tersebut dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di

dalam sila-sila Pancasila dari sila satu sampai sila lima, dan digunakan untuk melihat sejauhmana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila siswa rata-rata masih dalam kategori kurang. Adapun setiap katagori dijabarkan sebagai berikut, siswa dengan katagori sangat kurang sebanyak 10% (15 siswa), siswa dengan katagori kurang sebanyak 60% (90 siswa), siswa dengan katagori cukup 20% (30 siswa), siswa dengan katagori baik 10% (15), siswa dengan katagori sangat baik 0%..

Hal tersebut sejalan dengan penelitian tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dilakukan dengan cara survei yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2011. Tujuan utama survei adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang pentingnya 4 (empat) pilar kehidupan bernegara (Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dan juga untuk menggali pendapat masyarakat tentang cara yang paling tepat dan efektif agar masyarakat Indonesia dapat memahami dan menjalankan nilai-nilai moral yang dikandung dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Survei dilakukan di 181 kabupaten/kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan melibatkan 12.056 responden. Responden yang dipilih mewakili masyarakat pedesaan dan perkotaan, generasi muda, dan juga kelompok elit. Hasil dari survei tersebut adalah sebanyak 79,26% responden berpendapat bahwa Pancasila penting untuk dipertahankan. Selain itu, survei tersebut juga menyimpulkan 89% responden menganggap berbagai permasalahan bangsa seperti tawuran, konflik antar kelompok dan sebagainya terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai solusinya sebanyak 80% responden menginginkan agar implementasi nilai-nilai Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Maksud dari implementasi di sini bukan sekedar teori saja, tetapi lebih kepada pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah (Tim BPS, 2011).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin di Makassar, Minggu (10/3/2013) mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal inilah yang disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemilihan nilai-nilai empat pilar tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa ini lebih maju dan sejahtera," ucapnya.

Beliau menambahkan kegiatan sosialisasi sangat penting karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi akan terus dilakukan sehingga banyak masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik masih rendah. Padahal internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik menjadi hal yang mendasar dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini jika tidak segera teratasi maka akan terjadi kemerosotan moral di kalangan pelajar atau peserta didik yang berkelanjutan. Kemerosotan moral di kalangan pelajar atau peserta didik yang berkelanjutan akan berdampak serius terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena pelajar merupakan generasi yang diharapkan mampu menerima dan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Tidak dapat kita bayangkan apa jadinya negeri ini jika nantinya dipimpin oleh generasi yang mempunyai sikap moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dikembangkan model *CVCT* berbasis motivasional sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn. Model *CVCT* berbasis motivasional adalah suatu model pembelajaran yang merupakan penggabungan dari model pembelajaran *contextual* dengan model *VCT* (*Value Clarification Technique*) dengan mendasarkan pada motivasi peserta didik.

Melalui model *CVCT* berbasis motivasional diasumsikan akan dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Asumsi ini didasarkan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Model *CVCT* merupakan salah satu model yang implementasinya akan mengkaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan nyata peserta didik. Hal ini tentunya menuntut peserta didik aktif, kreatif dengan melakukan diskusi, demonstrasi atau peragaan, mencari dan menemukan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pribadi dan lingkungannya, sehingga pembelajaran akan menjadi menarik bagi peserta didik.
2. Melalui pembelajaran model *CVCT* pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Hal ini disebabkan peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini akan menjadi penting karena dengan mengkaitkan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah terlupakan.
3. Melalui pembelajaran model *CVCT* pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik. Hal ini karena pembelajaran *CVCT* mengacu paradigma konstruktivisme, dimana peserta didik dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui paradigma konstruktivisme peserta didik diharapkan belajar melalui mengalami bukan menghafal.
4. Model *CVCT* diasumsikan dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Hal ini disebabkan model *CVCT* merupakan cara menanamkan dan menggali nilai-nilai moral dari

peserta didik. Di samping itu *CVCT* : (a). Mampu membina dan membentuk nilai dan moral; (b). Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan; (c). Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri peserta didik dan nilai moral dalam kehidupan nyata; (d). Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan; (e). Mampu menuntun dan memotivasi peserta didik untuk hidup layak yang bermoral tinggi.

5. Motivasi merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran guru mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan dan memperhatikan motivasi peserta didik, maka hasilnya akan lebih baik. Apalagi jika rancangan materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dikaitkan dengan lingkungan peserta didik, mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dan memberikan manfaat atau kepuasan peserta didik, maka hasil internalisasi nilai-nilai Pancasila akan meningkat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya yang berlangsung saat ini ?
2. Seperti apakah model pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn pada Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya ?
3. Bagaimanakah prosedur pengembangan model *CVCT* berbasis motivasional sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya?
4. Sejauhmanakah keefektifan model *CVCT* berbasis motivasional sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya ?

C. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya yang berlangsung saat ini.
2. Menemukan model Pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn pada Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya ?
3. Menghasilkan model *CVCT* berbasis motivasional yang valid sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se- Solo Raya.
4. Menentukan tingkat keefektifan model *CVCT* berbasis motivasional sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya.

D. Spesifikasi Produk yang dikembangkan

Spesifikasi produk yang dihasilkan dari pengembangan ini adalah :

1. Buku model pembelajaran *CVCT* berbasis motivasional.

Buku model menguraikan tentang model *CVCT* secara umum yang digunakan sebagai dasar menyusun buku panduan guru dan buku panduan siswa. Spesifikasi buku model *CVCT* berbasis motivasional meliputi :

- a). Kata pengantar.
- b). Pendahuluan yang menguraikan tentang profil pembelajaran PPKn dan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila.
- c). Konsep dasar pengembangan model pembelajaran. Dalam hal ini diuraikan tentang pengertian model pembelajaran dan model pembelajaran menurut para ahli.
- d). Model *CVCT* berbasis motivasional, yang meliputi uraian tentang model pembelajaran *CVCT*, motivasi ARCS, desain model *CVCT*, model hipotetik, dan sintak model *CVCT*.

- e). Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada konsep ini diuraikan tentang hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tujuan dan ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- f). Internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang menguraikan tentang hakikat internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pengamalan Pancasila.

2. Buku Panduan Guru Model Pembelajaran CVCT Berbasis Motivasional.

Buku panduan guru mendeskripsikan tentang petunjuk guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dengan menggunakan model CVCT berbasis motivasional untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Buku panduan guru meliputi uraian tentang hal-hal sebagai berikut :

- a). Kata pengantar.
- b). Pendahuluan yang menguraikan tentang model CVCT berbasis motivasional kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila
- c). Desain perencanaan, desain pelaksanaan, dan desain penilaian pembelajaran.
- d). Pedoman pelaksanaan pembelajaran model CVCT, yang meliputi uraian tentang pedoman proses pelaksanaan pembelajaran dan pedoman proses pelaksanaan penilaian.
- e). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) model CVCT.

3. Buku Panduan Siswa Model pembelajaran CVCT Berbasis Motivasional.

Buku panduan siswa merupakan panduan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran PPKn. Buku panduan siswa berisi beberapa hal sebagai berikut :

- a). Kata pengantar.
- b). Pendahuluan.
- c). Kegiatan peserta didik pada tahap pendahuluan dalam pembelajaran.
- d). Kegiatan peserta didik pada tahap inti pembelajaran.
- e). Kegiatan peserta didik pada tahap penutup dalam pembelajaran.

- f). Materi pembelajaran PPKn.
4. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model CVCT berbasis motivasional.

Rencana pelaksanaan pembelajaran model CVCT berbasis motivasional berisi hal-hal sebagai berikut :

- a). Identitas yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi pembelajaran dan alokasi waktu.
- b). Kompetensi inti (KI).
- c). Kompetensi dasar (KD).
- d). Indikator pembelajaran.
- e). Tujuan pembelajaran.
- f). Materi pembelajaran.
- g). Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
- h). Penilaian proses dan hasil.
- i). Media dan sumber Belajar.

E. Pentingnya Pengembangan

Secara umum penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengembangan model pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya.

Secara khusus penelitian ini akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepala sekolah dalam rangka pembinaan kepada para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dimana guru dituntut menggunakan berbagai model pembelajaran diantaranya model CVCT berbasis motivasional.

2. Bagi Guru PPKn

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru PPKn, bahwa ternyata model CVCT berbasis motivasional dapat

digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila peserta didik. Oleh karena itu model ini bisa digunakan oleh guru PPKn dalam proses pembelajaran.

3. Bagi Peserta didik

Peserta didik dalam pembelajaran memperoleh materi secara utuh baik pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik dan peserta didik mendapatkan manfaat dan kepuasan.

4. Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam hal pengembangan nilai-nilai Pancasila di sekolah.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Ada beberapa asumsi dalam penelitian pengembangan ini, antara lain :

- a. Pengembangan model *CVCT* berbasis motivasional sebagai upaya meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya berdasarkan kurikulum 2013 ini merupakan hal yang baru.
- b. Bahwa model *CVCT* berbasis motivasional dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Internalisasi nilai-nilai Pancasila.
- c. Bahwa model *CVCT* berbasis motivasional dapat mengukur tingkat keberhasilan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
- d. Model *CVCT* berbasis motivasional dapat mengungkap kemampuan peserta didik baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang akan memberikan pengakuan sehingga muncul kepercayaan diri bagi peserta didik dan memberikan manfaat serta kepuasan bagi peserta didik.

- e. Guru mampu menerapkan model *CVCT* berbasis motivasional yang dikembangkan dan tersedianya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan model.

2. Keterbatasan Pengembangan

Penelitian pengembangan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

- a. Pengembangan model *CVCT* berbasis motivasional ini hanya diterapkan dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya.
- b. Pengembangan model *CVCT* berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn ini hanya diterapkan pada sebagian Kompetensi Dasar (KD) dalam pelajaran PPKn pada semester gasal.

G. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran dari perencanaan sampai pada evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Model *contextual* adalah model pembelajaran yang dalam pelaksanaan pembelajarannya mengkaitkan materi yang dibahas dengan kenyataan kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan peserta didik.
3. *VCT (Value Clarification Technique)* adalah model pembelajaran yang menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik.
4. Model *CVCT* adalah penggabungan model antara model *contextual* dengan model *VCT (Value Clarification Technique)*.
5. Pembelajaran berbasis motivasional adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi peserta didik, pembelajaran yang akan memberikan pengakuan peserta didik sehingga muncul kepercayaan diri serta pembelajaran yang akan bermanfaat bagi peserta didik dan memberi kepuasan peserta didik.

6. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai sila Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku peserta didik.

